



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : T.S. ARIF FADILLAH
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
3. NHK : 60932

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.265.000.000

1. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI
Rp. 255.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1239 m2/500 m2 di KAB / KOTA
KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 619 m2/361 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.275.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 808 m2/120 m2 di KAB / KOTA
KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/46 m2 di KAB / KOTA
KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 799.500.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOBIL, HONDA JEEF Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
249.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 458.971.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	93.488.348
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.616.959.348
III. HUTANG	Rp.	127.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.489.959.348

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.